



## KEMENPERIN TOLAK IMPOR KRL JABODETABEK

KRL Commuter Line melintas di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (28/2). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak rencana PT Kereta Commuterline Indonesia atau PT KCI untuk impor gerbong kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dalam rangka peremajaan armada, karena industri kereta api nasional dinilai mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

## Optimalkan Penggunaan Produk Lokal, Pemerintah Gencar Sosialisasi TKDN Industri Kecil

“Untuk lebih meningkatkan kinerja sektor industri, harus didukung dengan upaya memperkuat kualitas produk dalam negeri, serta menyusun instrumen pengamanan dalam bentuk regulasi agar produk dalam negeri dapat menguasai pasar dan memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita.

**JAKARTA (IM)** - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus aktif menyosialisasikan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Industri Kecil (IK).

Upaya ini juga dalam rangka mendorong peningkatan sertifikasi TKDN industri kecil (TKDN IK), sehingga para pelaku industri kecil bisa berpartisipasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akan berujung pada pengoptimalan penggunaan produk lokal.

Beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Sertifikasi TKDN untuk Industri Kecil di Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan yang bersifat *hybrid* tersebut dihadiri sebanyak 300 pelaku IKM yang berasal dari Kota Bekasi dan sekitarnya secara luring. Adapun peserta yang mengikuti secara daring meliputi perwakilan dari Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan serta pelaku IKM binaan di daerah tersebut.

“Untuk lebih meningkatkan kinerja sektor industri, harus didukung dengan upaya memperkuat kualitas produk dalam negeri, serta menyusun instrumen pengamanan dalam bentuk regulasi agar produk dalam negeri dapat menguasai pasar dan memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Selasa (28/2).

Menurut Reni, bentuk keberpihakan pemerintah kepada industri kecil antara lain adalah memberikan ke-

mudahan untuk mendapatkan sertifikat TKDN sesuai dengan amanat Permenperin 46/2022. “Kemudahan dalam memperoleh sertifikat TKDN-IK yang diberikan berupa penyederhanaan penghitungan nilai TKDN,” tuturnya.

Saat ini, pelaku industri kecil dapat melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN-nya, yang meliputi aspek bahan atau material langsung, tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), dan biaya untuk pengembangan. Pengajuan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat TKDN-IK tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). “Oleh karena itu, industri kecil yang ingin mengajukan permohonan penerbitan sertifikat TKDN-IK, wajib memiliki akun SIINas,” tegas Reni.

Penerbitan sertifikat TKDN IK ini tidak dipungut biaya alias gratis. “Tidak ada biaya sertifikasi yang dibebankan kepada industri kecil, bahkan proses sertifikasinya pun dibuat sederhana dan cepat, sehingga hanya membutuhkan waktu lima hari kerja saja,” ungkap Reni.

Sertifikat TKDN IK ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun serta dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu dua tahun.

Lajut jauh Reni menye-

butkan, kebijakan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pusat dan daerah serta BUMD dan BUMN, diharapkan dapat memperoleh pasar produk dalam negeri dan sekaligus memberikan *multiplier effect* yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kebijakan P3DN juga diharapkan akan membangkitkan rasa nasionalisme seluruh lapisan masyarakat untuk mulai mencintai dan bangga menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya.

Keberpihakan Pemerintah pada produk dalam negeri, utamanya yang dihasilkan oleh UMKM dan IKM, terlihat dari beberapa kebijakan yang telah diterbitkan seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Aturan tersebut menegaskan perlunya merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Inpres 2/2022 juga mengamanat-

kan untuk mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM (termasuk IKM) dan Koperasi pada e-Katalog nasional, sektoral dan lokal.

“Pemerintah juga berupaya mendorong peningkatan realisasi belanja barang/jasa pemerintah untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri melalui Belanja Langsung Pengadaan LKPP atau yang dikenal dengan Bela Pengadaan,” imbuhnya.

Reni juga menyapaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri mengamanatkan kepada Pemerintah untuk wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaannya minimal 40%.

“Tentunya produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN 40% akan menjadi pahlawan negeri ini. Dengan upaya ini, ke depannya kami harapkan akan semakin banyak produk dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah dan badan usaha,” papar Reni. • hen



**PULAUINTAN**  
General Contractor

**PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA**  
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

## IPO, Mitra Pack Patok Harga Rp120 per Saham

**JAKARTA (IM)** - PT Mitra Pack Tbk (kode saham: PTMP) telah menetapkan harga penawaran umum saham perdana atau IPO yang berlangsung mulai 27 Februari hingga 2 Maret 2023 sebesar Rp120 per saham.

Melansir prospektus di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (28/2), perseroan menargetkan dana segar senilai Rp96 miliar dan dijadwalkan melantai di BEI pada 6 Maret 2023.

Dilansir dari *Antara*, Mitra Pack menawarkan sebanyak-banyaknya 800 juta saham baru atau setara 25,24 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah proses IPO, serta menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek.

Manajemen perseroan menjelaskan dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk modal kerja yaitu meningkatkan persediaan barang regular seperti, pembelian *consumable*, mesin printer dan sparepart.

Selain itu, untuk mengembangkan pasar dalam hal perluasan pelanggan sewa di sektor penyewaan, menambah dan mengembangkan produk baru, serta untuk pemasaran dan marketing.

Sebagai informasi, Mitra Pack mencatatkan laba yang belum diaudit senilai

Rp16,62 miliar per 30 November 2022, atau naik 103,9 persen year on year (yoy) dari sebesar Rp8,15 miliar pada periode sama 2021. Perseroan meraup penjualan senilai Rp123,65 miliar per 30 November 2022, atau tumbuh 13,21 persen yoy dari sebesar Rp76,29 miliar pada periode sama 2021.

Adapun, beban pokok penjualan perseroan mencapai Rp82,61 miliar per 30 November 2022. Sedangkan, liabilitas perseroan tercatat Rp49,84 miliar per 30 November 2022, dengan ekuitas sebesar Rp76,39 miliar. Dengan demikian, total aset perseroan tercatat sebesar Rp126,23 miliar per 30 November 2022.

Hingga saat ini, perseroan telah memiliki perjanjian dengan dua pemasok yaitu Perjanjian distribusi non eksklusif dengan Markem Imaje Singapore Pte Ltd perjanjian distribusi dengan Thermo Ramsey LLC yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan.

Mitra Pack bergerak di bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan, termasuk suku cadang dan service seperti coding, marking, labeling dan product inspection system, serta shrink-packaging, protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging melalui anak perusahaan.

• pan

## OJK Targetkan Indeks Literasi Keuangan Naik Jadi 70 Persen

**JAKARTA (IM)** - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan indeks literasi keuangan dapat meningkat dan dijaga pada level 65 sampai 70 persen untuk menutup jarak dengan indeks inklusi keuangan.

Pada 2022, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis oleh OJK menunjukkan indeks literasi keuangan nasional sebesar 49,68 persen atau di bawah indeks inklusi keuangan yang sebesar 85,10 persen.

“Kita mengejar paling tidak sama dengan negara lain, indeks literasi kita capai 65 sampai 70 persen supaya kita agak sedikit lega gap literasi dan inklusi kita tidak terlalu tinggi,” kata Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Horas Tarihoran dalam webinar “Milennial Cuan Melek Keuangan” di Jakarta, Selasa (28/2).

Dilansir dari *Antara*, Horas mengatakan OJK juga ingin meningkatkan indeks literasi keuangan mahasiswa yang pada 2022 masih sebesar 45,93 persen atau lebih rendah dari indeks literasi rata-rata nasional.

“Kami memandang milenial penting didukasi agar literasi keuangan meningkat secara umum, karena sekarang 1 dari 4 penduduk

Indonesia atau sekitar 69 juta jiwa adalah milenial,” katanya.

Ke depan ia memperkirakan pada 2040 sampai 2045 masyarakat milenial akan mencapai setengah dari total masyarakat Indonesia sehingga peningkatan literasi keuangan perlu diakselerasi.

Berdasarkan survei OJK, hanya 10,7 persen dari milenial yang dapat menabung, sementara 51,1 persen menghabiskan pendapatan untuk konsumsi.

“Kalau terjadi sesuatu seperti COVID-19, hanya 32 persen yang mengatakan sanggup bertahan sebulan jika kehilangan pekerjaan dan sebanyak 28 persen mengatakan hanya sanggup bertahan seminggu,” katanya.

OJK saat ini juga memiliki platform learning management system edukasi keuangan (LMSE) yang bisa diakses secara gratis.

Lebih jauh Horas mengatakan pada bulan Maret 2023, platform tersebut akan dirilis sebagai media pembelajaran bagi peserta Kartu Pra Kerja.

“Kami dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bekerja sama agar semua orang bisa memanfaatkan modul ini,” katanya. • dot

## Digelar Hari Ini, INACRAFT 2023 Jadikan Sulawesi Selatan Sebagai Ikon Pameran



Ketum BPP ASEPHI Muchsin Ridjan, Project Officer INACRAFT 2023 Baby Jurnawati, Direktur Mediatama Event Umi Noor Wijiati, Kadis Perindustrian Sulsel H. Ahmadi Akil dan Deputy GM Marketing Communication BNI Ansyarif R Medanarto.

**JAKARTA (IM)** - Pameran bertajuk The 23<sup>rd</sup> Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT 2023), sebagai salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara, kembali digelar untuk ke-23 kalinya di Jakarta Convention Center (JCC), 1–5 Maret 2023 yang menempati seluruh hall Balai Sidang termasuk Lower Lobby dan seluruh ruangan

lainnya untuk menampung seluruh kegiatan pendukung dan fasilitas pameran untuk peserta dan pengunjung (+ 25.000 m2).

Pameran yang diprakarsai oleh ASEPHI (Asosiasi Ekspor dan Pengusaha Handicraft Indonesia) bekerja sama dengan Mediatama Event ini bertujuan sebagai wadah promosi produk-produk kerajinan lokal untuk meraih peluang

pasar domestik dan membuka peluang pasar internasional sebagai komoditi ekspor ke mancanegara di mana pada tahun ini peranan pameran untuk membangun kembali semangat para UKM Kerajinan bangkit menuju pemulih ekonomi nasional sekaligus menjadi etalase produk-produk kerajinan Indonesia terbaru dan berkualitas.

“Dengan tema tetap

“From Smart Village to Global Market”, INACRAFT ke-23 berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai ikon pameran yang akan menampilkan produk-produk kerajinan unggulan dan kreatif sekaligus mengangkat kekayaan tradisi, seni dan budaya Sulawesi Selatan dengan tagline *The Authentic South Sulawesi*,” kata Ketua Umum BPP ASEPHI Muchsin Ridjan, dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (28/2).

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan H. Ahmadi Akil, mengatakan, Pemprov Sulawesi Selatan mengisi Paviliun Ikon dengan mengangkat miniatur Kapal Pinisi di area utama pameran serta perwakilan tiga suku utama di tiap gerbang INACRAFT yaitu Bugis, Makassar dan Toraja.

“Sulawesi Selatan membawa semangat mengembalikan kejayaan sutera Sulawesi akan turut menampilkan tari dan musik selama pameran serta kuliner khas yang terkenal dan

mendapatkan pengakuan warisan budaya tak benda atau UNESCO Intangible Cultural Heritage,” tambahnya.

Ada pun tahun ini INACRAFT diikuti 1118 UKM peserta mengisi 1.200 booth, terdiri dari 904 anggota ASEPHI, 214 non anggota, dan 61 peserta binaan Kemenperin, Kemendag, Kemenparekraf, Kementerian BUMN dan Kemenkum dan HAM, 35 BUMN, 255 peserta binaan Dinas/Dekranasda dan dihadiri visitor/tamu khusus internasional.

Terdapat 133 peserta kategori Ekspor dan siap ekspor yang tersebar dengan tanda khusus di booth masing-masing. Pameran INACRAFT menargetkan 170.000 pengunjung dengan target transaksi retail sebesar Rp145 milyar rupiah dengan kontak dagang diharapkan mencapai USD 12 juta.

Ragam Produk yang dipamerkan berasal dari 7 kategori bahan baku (Keramik, Serat Alam, Logam, Batu-batuan, Tekstil, Kayu, dan Bahan lainnya) mulai dari Batik, Traditional. • kris